



# KEUANGAN PUBLIK

Tim Penulis:

Akhmad Solikin, Tine Badriatin & Wilman San Marino, Siska Yulia Defitri,  
Hans Victor Sitepu, Abdullah, Diana Widhi Rachmawati, Robert Tua Siregar,  
Sunita Dasman, Cut Risya Varlitya, Nuryanti Permata Sari.

# KEUANGAN PUBLIK

Tim Penulis:

Akhmad Solikin, Tine Badriatin & Wilman San Marino, Siska Yulia Defitri,  
Hans Victor Sitepu, Abdullah, Diana Widhi Rachmawati, Robert Tua Siregar,  
Sunita Dasman, Cut Risya Varlitya, Nuryanti Permata Sari.



# KEUANGAN PUBLIK

Tim Penulis:

**Akhmad Solikin, Tine Badriatin & Wilman San Marino, Siska Yulia Defitri,  
Hans Victor Sitepu, Abdullah, Diana Widhi Rachmawati, Robert Tua Siregar,  
Sunita Dasman, Cut Risya Varlitya, Nuryanti Permata Sari.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana  
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

**Evi Damayanti**

ISBN:

**978-623-500-021-3**

Cetakan Pertama:

**Februari, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang “Keuangan Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan “Keuangan Publik”.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Keuangan Publik. Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen arau warga masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung akan memengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi masyarakat.

Keuangan Publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah dalam perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat kegagalan pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat digunakan oleh pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk menyediakan barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta, kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu

dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih menghilangkan kegagalan pasar (*market failures*), intervensi pemerintah dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (*government failures*).

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2024

Penulis

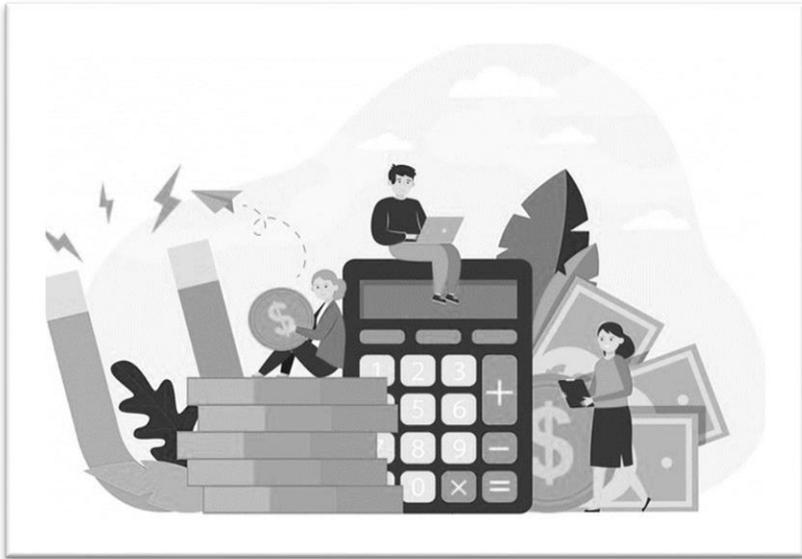
# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR KEUANGAN PUBLIK</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	2
B. Pengertian Keuangan Publik .....	3
C. Peran Pemerintah Dalam Berbagai Sistem Perekonomian .....	5
D. Alasan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian Sistem Pasar .....	10
E. Cara Intervensi Pemerintah .....	13
F. Lingkup Keuangan Publik .....	16
G. Rangkuman Materi .....	18
<b>BAB 2 ANGGARAN PUBLIK</b> .....	<b>23</b>
A. Pendahuluan .....	24
B. Definisi dan Konsep Dasar .....	25
C. Tujuan Anggaran Publik .....	26
D. Proses Pembuatan Anggaran .....	28
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran .....	30
F. Sumber Pendapatan Publik .....	31
G. Alokasi Belanja Pajak .....	33
H. Evaluasi dan Pengawasan Anggaran .....	34
I. Tantangan dan Isu Terkini .....	36
J. Rangkuman Materi .....	38
<b>BAB 3 PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK</b> .....	<b>41</b>
A. Pendapatan Publik .....	42
B. Pengertian Pajak .....	43
C. Teori Perpajakan .....	44
D. Karakteristik Sistem Pajak yang Baik .....	46
E. Fungsi Pajak .....	47
F. Manfaat Pajak .....	48
G. Jenis-jenis Pajak .....	52
H. Sistem Pemungutan Pajak .....	54
I. Rangkuman Materi .....	56

<b>BAB 4 PENGELOLAAN UTANG PUBLIK .....</b>	<b>59</b>
A. Pendahuluan.....	60
B. Definisi .....	62
C. Tujuan dan Koordinasi Pengelolaan Utang .....	64
D. Transparansi dan Akuntabilitas .....	66
E. Kerangka Kerja Organisasi .....	69
F. Strategi Pengelolaan Utang .....	72
G. Manajemen Risiko .....	73
H. Utang Publik Sebagai Bagian Dari Manajemen Keuangan Publik.....	75
I. Rangkuman Materi .....	75
<b>BAB 5 EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK.....</b>	<b>79</b>
A. Pendahuluan.....	80
B. Penerimaan Pemerintah Daerah .....	82
C. Analisis Potensi Pendapatan Daerah .....	83
D. Analisis Pertumbuhan Pendapatan .....	86
E. Analisis Rasio Keuangan Publik.....	86
F. Derajat Desentralisasi.....	86
G. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	87
H. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	87
I. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	88
J. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	89
K. Rasio Efektivitas Pajak Daerah.....	90
L. Rasio Efisiensi Pajak Daerah .....	91
M. Derajat Kontribusi BUMD .....	91
N. Rangkuman Materi .....	92
<b>BAB 6 MANAJEMEN RISIKO DALAM KEUANGAN PUBLIK .....</b>	<b>95</b>
A. Pendahuluan.....	96
B. Manajemen Risiko Keuangan Publik .....	96
C. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan Publik.....	98
D. Proses Manajemen Risiko.....	100
E. Alat Manajemen Risiko.....	103
F. Pelaporan dan Monitoring Risiko .....	105
G. Tantangan dan Peluang Masa Depan Dalam Manajemen Risiko Keuangan Publik .....	107

H. Rangkuman Materi .....	109
<b>BAB 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEUANGAN PUBLIK .....</b>	<b>115</b>
A. Pendahuluan .....	116
B. Perkembangan Organisasi Keuangan .....	118
C. Keuangan dan Pengambilan Keputusan .....	120
D. Peran Pemimpin Dalam Keuangan Publik .....	124
E. Rangkuman Materi .....	128
<b>BAB 8 KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI .....</b>	<b>133</b>
A. Pendahuluan .....	134
B. Pengeluaran Publik di Indonesia .....	135
C. Keberlanjutan Keuangan Publik di Indonesia .....	135
D. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Publik .....	138
E. Kualitas Pengeluaran di Indonesia .....	142
F. Memperbaiki Kualitas Pengeluaran Publik .....	146
G. Rangkuman Materi .....	149
<b>BAB 9 KEUANGAN PUBLIK DAN ISU-ISU GLOBAL .....</b>	<b>155</b>
A. Pendahuluan .....	156
B. Keuangan Publik Negara-Negara Yang Tergabung Dalam G-20 .....	157
C. Tantangan Keuangan Publik Negara Tiongkok .....	160
D. Dampak Perang Rusia-Ukraina Pada Keuangan Publik Kawasan Regional Eropa .....	162
E. Pengelolaan Keuangan Publik dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Dimasa Depan .....	164
F. Rangkuman Materi .....	168
<b>BAB 10 MASA DEPAN KEUANGAN PUBLIK .....</b>	<b>173</b>
A. Pendahuluan .....	174
B. Tantangan Global Dalam Keuangan Publik .....	175
C. Teknologi dan Inovasi Dalam Pengelolaan Keuangan Publik .....	176
D. Keuangan Publik Berkelanjutan .....	178
E. Partisipasi Publik dan Transparansi .....	180
F. Krisis Keuangan Publik dan Manajemen Risiko .....	182
G. Reformasi Kebijakan Fiskal dan Moneter .....	183
H. Pendidikan Keuangan Publik .....	185
I. Kerjasama Internasional Dalam Keuangan Publik .....	186

J. Rangkuman Materi .....	188
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>194</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>201</b>



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 1: KONSEP DASAR KEUANGAN PUBLIK

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., CA.

Politeknik Keuangan Negara STAN

# BAB 1

## KONSEP DASAR KEUANGAN PUBLIK

---

### A. PENDAHULUAN

Bab pertama buku ini akan membahas tentang konsep dasar keuangan publik (*public finance*). Topik-topik yang akan dibahas pada bab ini meliputi pengertian dan pentingnya mempelajari keuangan publik, peran pemerintah dalam berbagai sistem perekonomian, alasan intervensi pemerintah dalam pasar, cara pemerintah melakukan intervensi pasar serta ruang lingkup keuangan publik.

Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen atau warga masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung akan memengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi masyarakat.

Pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat juga diilustrasikan dengan data makroekonomi tentang peran pengeluaran pemerintah sebagai pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari segi pengeluaran. Berdasarkan data BPS (2023b), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib berperan menyumbang sekitar 2 sampai 3 persen dari PDB triwulanan pada periode Q3 2021 sampai dengan Q2 2023. Selanjutnya, apabila ditinjau dari

# DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. S. R. (2022). Impor pangan dan perburuan rente perspektif ekonomi politik. *Journal of Politics and Policy*, 4(1), 65-83.
- Babson, B. O. (2016). The North Korean economic systems. *International Journal of Korean Studies*, 20(1), 149-175.
- Benecke, D. W. (2008). Social and ecological market economy- A general overview. In Küsel dkk. *The Social and Ecological Market Economy- A Model for Asian Development?* Eschborn: GTZ.
- BPS. (2023a). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2023b). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023*. Jakarta: BPS.
- Fisher, R. C. (2023). *State and Local Public Finance*, 5<sup>th</sup> ed. London & New York: Routledge.
- Greene, J. E. (2020). *Public Finance: An International Perspective*, Revised Ed. Singapore: World Scientific.
- Gruber, J. (2018). *Public Finance and Public Policy*, 5<sup>th</sup> ed. New York: Worth Publishers.
- Hyman, D. N. (2010). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, 10<sup>th</sup> ed. Mason: South Western, Cengage Learning.
- Khan, A. (2019). *Fundamentals of Public Budgeting and Finance*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Kitchen, H., McMillan, M. & Shah, A. (2019). *Local Public Finance and Economics: An International Perspective*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Kozminski, A. K. (1990). Market and state in centrally planned economies. *Current Sociology*, 38(2), 133-155.
- McCain, R. A. (2015). *Welfare Economics: An Interpretive History*. London & New York: Routledge.
- Mokoginta, I. S. (2012). *Leviathan Government Behavior: The Case of Local Government in Indonesia*. Unpublished thesis. Flinders University.
- Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*, ed. 2. Jakarta: Indeks.

- Öst, C. E. (2014). Economic incentives, housing allowance, and housing consumption: An unintended consequence of a shift in housing policy. *Journal of Housing Economics*, 23, 17-27.
- Pindyck, R. S. & Rubinfeld, D. L. (2017). *Microeconomics*, 9<sup>th</sup> ed. Essex: Pearson.
- Rosen, H. S. & Gayer, T. (2009). *Public Finance*, 9<sup>th</sup> ed. New York: McGraw-Hill.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek hukum penyederhanaan perizinan badan usaha di bidang lingkungan hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Solikin, A. (2023). Pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam Kurnia, M. R. (ed). *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Tresch, R. W. (2015). *Public Finance: A Normative Theory*, 3<sup>rd</sup> ed. London: Academic Press.
- Wahjono, S. I. & Marina, A. (2009). Kebijakan anti monopoli dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance*, 3(1), 1-15.



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 2: ANGGARAN PUBLIK

# BAB 2

## ANGGARAN PUBLIK

---

### A. PENDAHULUAN

Anggaran publik merupakan alat yang sangat penting dalam mengelola keuangan suatu negara atau pemerintahan. Anggaran publik mencerminkan rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan sumber daya finansial guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Anggaran publik melibatkan perencanaan, alokasi, dan pengawasan penggunaan dana publik. Proses penyusunan anggaran melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks anggaran publik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pendapatan dan belanja publik, serta kebijakan fiskal yang diimplementasikan untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Pengambilan keputusan terkait alokasi dana untuk sektor-sektor tertentu juga mencerminkan prioritas dan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah.

Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran publik juga merupakan elemen penting. Keterlibatan publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam kebijakan keuangan negara.

Dalam konteks global yang terus berubah, tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan semakin kompleks. Oleh karena itu, peran anggaran publik sebagai instrumen strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan juga semakin meningkat.

# DAFTAR PUSTAKA

- Darsono & Ari P. 2010. Penganggaran Perusahaan. Edisi ke-2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Muhammad Narafin. 2007. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Banjarmasin: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rudianto. 2009. Penganggaran. Jakarta: Erlangga.
- Tendi Haruman & Sri Rahayu. 2007. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Edisi ke-2. Bandung: Graha Ilmu Tim Penyusun Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. Modul Belanja Daerah Khusus Keuangan Daerah (KKD) 2013. Jakarta.



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 3: PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK

Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

# BAB 3

## PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK

---

### A. PENDAPATAN PUBLIK

Secara umum, tugas pemerintah dalam melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan publik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu tugas dibidang ekonomi dengan meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan diluar ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan sebagai penyelenggara negara, yaitu pemerintah pusat dan daerah, sangat ditentukan oleh kemampuan mensejahterakan masyarakat. (Batin, 2022). Tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ini dapat dilakukan melalui peningkatan ekonomi nasional (*economy public*) (Idris, 2018), salah satunya adalah mengatur penerimaan negara (R. Ridwan & Nawir, 2021).

Pengelolaan sumber pendapatan negara sangat penting untuk menjamin kestabilan ekonomi negara dan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Pajak, penerimaan dari sumber daya alam dan berbagai sumber pendapatan lainnya merupakan pendapatan publik, yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik lainnya seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya (Fuadi et al., 2023). Pendapatan publik merupakan salah satu sumber keuangan utama pemerintah dalam menjalankan program-program publiknya. Sumber-sumber pendapatan lainnya seperti bunga pinjaman dan dividen dari investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan sumber-sumber pendapatan tersebut harus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik (Vol. 1)*. Kencana.
- Fuadi, A., Adha, R., Wati, P., & Harahap, I. (2023). Analisis Deskriptif Mengenai Pendapatan dan Pengeluaran Publik Dalam Kebijakan Fiskal. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19283>
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik (1st ed., Vol. 1)*. Deepublish.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal (1st ed.)*. Graha Ilmu.
- Ridwan, R., & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik (M. F. Ridwan, Ed.; Vol. 1)*. Pustaka Pelajar.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi: Vol. I (N. Budiana, Ed.)*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- UU Nomor 16, Pemerintah (2009).



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 4: PENGELOLAAN UTANG PUBLIK

Hans Victor Sitepu, S.E., M.M., CMA., CACP., CRMP.

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

# BAB 4

## **PENGELOLAAN UTANG PUBLIK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

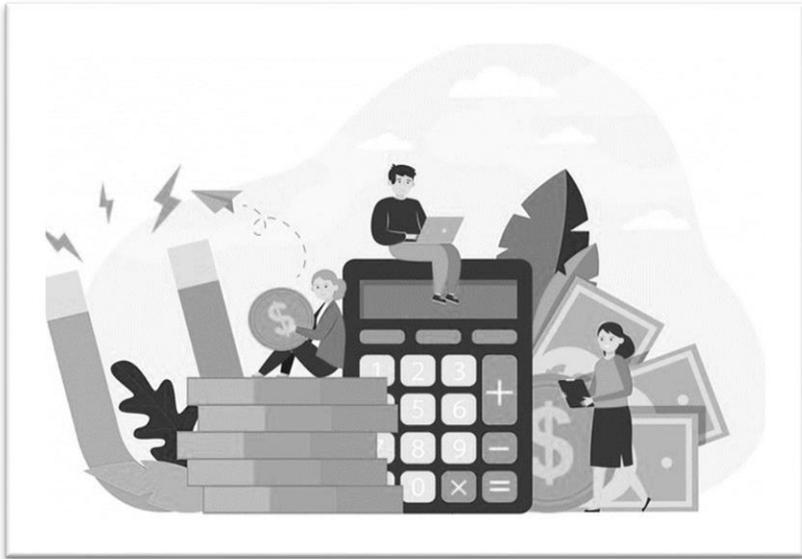
Setiap Pemerintah di setiap negara di dunia ini memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai hal tersebut, setiap pemerintahan tersebut menempuh berbagai upaya dan kebijakan yang paling optimal untuk dapat mengakomodir dan memaksimalkan kekuatan keuangan dan potensi kekayaan alam serta sumber daya lainnya yang mereka miliki. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu komponen keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Utang negara, atau yang sering dikenal dengan Utang Publik. Utang Negara atau Utang Publik ini diatur oleh Undang-undang melalui APBN. Utang Publik ini menjadi salah satu komponen penting di dalam APBN sebagai sumber penerimaan yang mendanai pengeluaran APBN setiap tahunnya, mengingat bahwa Pembangunan nasional memang membutuhkan ketersediaan dana yang cukup besar. Jika negara kita hanya mengandalkan sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan negara (seperti pendapatan dari sektor perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, hibah, dan lain-lain), niscaya segala pengeluaran negara yang diperlukan setiap tahunnya akan sulit untuk terpenuhi secara maksimal, sehingga berisiko dapat menghambat kegiatan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat. Selain dibutuhkan, Utang Publik sering kali juga mengandung struktur keuangan yang rumit dan berisiko, sehingga dapat mendatangkan risiko yang besar bagi neraca pemerintah dan stabilitas keuangan negara.

# DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023, November 1). *Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)*. Diambil kembali dari <https://www.bi.go.id/https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/suspi/default.aspx#:~:text=Utang%20sektor%20publik%20merupakan%20posisi,kepada%20penduduk%20maupun%20bukan%20penduduk>.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2023, July 1). *Strategi Pengelolaan Utang*. Diambil kembali dari <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/https://www.djppr.kemenkeu.go.id/strategipengelolaanutang>
- International Monetary Fund and the World Bank. (2001). *Guidelines for Public Debt Management*. Geneva: International Monetary Fund.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, January 1). *Menjawab Utang*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang>
- Nordian, D. P. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Putri, A. A. (2023, Juni 15). *Bukannya Menurun, Utang Indonesia Justru Bertambah tiap Era Presiden*. Diambil kembali dari <https://goodstats.id/https://goodstats.id/article/bukannya-menurun-utang-indonesia-justru-bertambah-tiap-era-presiden-47AGG#:~:text=Ternyata%2C%20Indonesia%20sudah%20mulai%20terjerat,AS%20atau%20sekitar%20Rp56%20triliun>.
- Riyanto, A. P. (2015). *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Warren C. S., R. J. (2006). *Pengantar Akuntansi Edisi 21*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt J. J., K. P. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS (2e ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 5: EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK

Dr. Abdullah, S.E., M.Si.

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

# BAB 5

## **EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Keuangan publik atau keuangan negara menekankan pada upaya merasionalisasi peran negara dalam perekonomian atas dasar kegagalan pasar dalam mendistribusikan pendapatan negara yang dihasilkan melalui proses dan mekanisme pasar yang sesuai norma umum dan berkeadilan. Dalam kajian keuangan publik saat ini, pendekatan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terbesar dalam perkembangan literatur yang ada. Menurut (Halim, Abdul, 2019) salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disamping barang-barang inventaris kekayaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara, sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seperti halnya negara, APBD dan barang-barang inventaris kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Keduanya merupakan unsur penting keuangan daerah.

Manajemen keuangan publik dapat didefinisikan sebagai sistem untuk menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Bastian, 2020, h. 3).

Laporan keuangan daerah merupakan output akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pada tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2020). *Manajemen Keuangan Publik* (Lidya Mayasari (ed.); 1st ed.). Andi Yogyakarta.
- Faud, M. (2014). *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah* (1st ed.). Deepublish.
- Halim, A. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi. AKUNTASI SEKTOR PUBLIK. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah.* (Ema Sri Suharsi (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Revisi). Rajawali Pers.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (keempat). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Usman. (2012). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Pelangi Ilmu - Universitas Gorontalo*, 5(1).



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 6: MANAJEMEN RISIKO DALAM KEUANGAN PUBLIK

Diana Widhi Rachmawati, S.IP., M.M.

Universitas PGRI Palembang

# BAB 6

## **MANAJEMEN RISIKO DALAM KEUANGAN PUBLIK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam dunia keuangan publik yang dinamis, pemerintah dan entitas sektor publik harus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dalam konteks keuangan publik, di mana tanggung jawab terhadap dana publik dan keberlanjutan layanan menjadi prioritas utama, manajemen risiko menjadi landasan yang krusial.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, entitas publik dapat meningkatkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil serta meminimalkan dampak negatif terhadap keuangan. Dalam era globalisasi dan interkoneksi ekonomi, risiko keuangan publik tidak terbatas pada batas nasional. Perubahan dalam kondisi pasar global, fluktuasi mata uang, dan peristiwa geopolitik dapat dengan cepat mempengaruhi keuangan suatu negara.

### **B. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN PUBLIK**

Menurut John Y Campbell dan Luis M. Viceira, manajemen risiko keuangan publik (Wijoyo, 2016) adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan stabilitas keuangan sektor publik. Hal ini mencakup strategi manajemen risiko, termasuk penggunaan instrumen keuangan dan taktik mitigasi risiko. Proses perencanaan dan penerapan strategi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan keuangan publik. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk meminimalkan potensi dampak fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan dan faktor risiko lainnya terhadap posisi keuangan pemerintah seperti yang diutarakan oleh Peter M. DeMarzo dan Robert L. Gertner mendefinisikan manajemen risiko keuangan public (Eko Sudarmanto, 2020)

# DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, V. M. (2021, August). Peran anak muda melakukan inovasi untuk UMKM di masa dan pasca pandemi. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 1, No. 1).
- Anas, M. (2021). Manajemen Keuangan.
- Anita, S. Y., Kustina, K. T., Wiratikusuma, Y., Sudirjo, F., Sari, D., Rupiwardani, I., ... & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2023). *Manajemen Risiko*. Global Eksekutif Teknologi.
- Anwar, Z., Purwanto, H. L., & Agustina, R. (2020). Sistem Informasi Pelaporan Komplain Dan Monitoring Perbaikan Sarana Dan Prasarana Berbasis Android. *RAINSTEK: Jurnal Terapan Sains & Teknologi*, 2(4), 294-302.
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67-80.
- Hadiguna, R. A. (2012). Model penilaian risiko berbasis kinerja untuk rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Teknik Industri*, 14(1), 13-24.
- Harimurti, F. (2006). Manajemen Risiko, Fungsi dan Mekanismenya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1).
- Hermawan, H., & Prasetyo, A. H. (2022). Rancangan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (ISO 37001: 2016) Berbasis Manajemen Risiko. *Jurnalku*, 2(1), 1-15.
- Hidayatullah, H. (2023). MANAJEMEN RISIKO OPEASIONAL.
- Jakaria, D. A., & Dirgahayu, R. T. (2013, June). Manajemen Risiko Sistem Informasi Akademik pada Perguruan Tinggi Menggunakan Metoda Octave Allegro. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Junaedi, D. I. (2017). Antisipasi Dampak Social Engineering Pada Bisnis Perbankan. *Infoman's: Jurnal Ilmu-ilmu Manajemen dan Informatika*, 11(1), 1-10.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).

- Kusbandono, H., Ariyadi, D., & Lestariningsih, T. (2019). Tata Kelola Teknologi Informasi.
- Lantang, G. W., Cahyono, A. D., & Sitokdana, M. N. N. (2019). Analisis risiko teknologi informasi pada aplikasi sap di pt serasi autoraya menggunakan iso 31000. *Sebatik*, 23(1), 36-43.
- Medellu, C. S. (2013). PEMODELAN MATEMATIK, ANALISIS KETIDAKPASTIAN DAN SENSITIVITAS.
- Mustofa, M. L. (2012). Monitoring dan evaluasi: konsep dan penerapannya bagi pembinaan kemahasiswaan.
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195-204.
- Purpadita, E. P., Hutajulu, M. R., & Prasetyo, A. H. (2013). MODEL PENGELOLAAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PT. PERDANA KARYA PERKASA, TBK. *Journal of Management and Business Review*, 10(1).
- Rachman, A. N., Musa, A. E. Z., & Latiep, I. F. (2023). Pemanfaatan Media Komunikasi Digital Pada Pelayaran. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 137-144.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540-1554.
- Sari, W. (2020). Risk Maturity Level dan Upaya Peningkatannya. *Karya Ilmiah Online Universitas Trisakti*.
- Sepang, B. A. W., Tjakra, J., Langi, J. E. C., & Walangitan, D. R. O. (2013). Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan ruko Orlens Fashion Manado. *Jurnal Sipil Statik*, 1(4).
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen risiko: deteksi dini upaya pencegahan Fraud. *Jurnal ilmu manajemen*, 9(2), 107-121.

- Suwinardi, S. (2016). Manajemen risiko proyek. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 12(3).
- Syaifulloh, S. E. PENDEKATAN MANAJEMEN BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF SOSIAL. *GREEN MANAGEMENT STRATEGY*, 39.
- Syarifudin, A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pengajuan dan Pelaporan Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 8(2), 149-158.
- Vidiarto, A., Azis, R., Mulyanto, A., & Prasetyono, H. (2023). Pengaruh Budaya Peduli Resiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Resiko Organisasi. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 982-991.
- Wijoyo, N. A. (2016). Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dengan Menggunakan Model GARCH. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 169-189.



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 7: PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEUANGAN PUBLIK

Robert Tua Siregar, Ph.D.

Universitas Prima Indonesia

---

# BAB 7

## **PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEUANGAN PUBLIK**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Organisasi otoritas publik, jenis kekuasaan yang mereka miliki, dan batasan serta kontrol yang diterapkan pada tindakan mereka sangat bervariasi antar negara. Dalam sebagian besar sistem demokrasi, wewenang publik dilaksanakan oleh eksekutif, yang tunduk pada kendali badan perwakilan terpilih (misalnya parlemen atau majelis). Dalam sebuah organisasi khususnya lembaga pemerintahan yang menggunakan keuangan publik, aturan pasti tentang apa yang dapat dilakukan oleh eksekutif dan tentang hubungan dengan badan perwakilan berbeda-beda di setiap negara dan pemerintah daerah (Sudono, 2023). Secara umum, eksekutif bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari sektor publik (termasuk pengawasan entitas sektor publik, seperti badan usaha milik negara dan utilitas kota) (Papatungan, Ilat and Morasa, 2017). Dalam melakukan keputusan bersama, diperlukan Badan perwakilan mengawasi eksekutif dan menyetujui alokasi sumber daya keuangan oleh eksekutif. Jadi bagaimana proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan? Pertama, eksekutif perlu memperkirakan total pendapatan yang diharapkan di masa depan dari pendapatan pajak dan sumber pendapatan lainnya, misalnya retribusi, sumber daya alam, lotere, dan sebagainya.

Pendapatan yang diharapkan di masa depan bergantung pada berbagai faktor, termasuk keadaan perekonomian di masa depan, dan memperkirakannya memerlukan penerapan model makro-ekonomi yang canggih, yang umumnya dikembangkan oleh staf Departemen Keuangan, kantor statistik nasional, atau bank sentral nasional. Perkiraan akhir akan membentuk jumlah maksimum uang yang harus dibelanjakan oleh eksekutif di masa depan tanpa menimbulkan defisit fiskal, yaitu ketika

## DAFTAR PUSTAKA

- ALDI, B. (2005) 'Menjadikan Manajemen Pengetahuan Sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan Melalui Strategi Berbasis Pengetahuan', *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO)*, Volume 2(Nomor 1), pp. 58–68.
- Apriyandi (2011) 'PENGARUH INFORMASI ASIMETRI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ANGGARAN PARTISIPATIF DENGAN BUDGETARY SLACK (Studi Empiris pada Kabupaten Wajo)', *Skripsi* [Preprint].
- Busro, M.D. (2020) 'Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia', in *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Candraningrum, D.A. (2018) 'Teknologi Komunikasi Informasi Untuk Peningkatan Kesadaran Publik Pada Organisasi Sosial', *Jurnal Komunikasi*, 10(2), p. 177. Available at: <https://doi.org/10.24912/jk.v10i2.2727>.
- Dasar, K. and Relevansi Kebijakan, dan (1993) *Hipotesis Ekspektasi Rasional, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*.
- Dewanta, A.S. (2004) 'Otonomi dan Pembangunan Daerah', *Unisia* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>.
- HAIKAL, F. (2020) *Persepsi masyarakat kota medan tentang penyebaran danantisipasi virus corona*.
- Hasbiah, S. et al. (no date) 'Model Markowitz Dalam Keputusan Investasi Saham Pada Index Lq45 di Bursa Efek Indonesia'. Available at: <https://doi.org/10.26858/jekpend>.
- Heriyandy, L., Kaluge, D. and Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, F. (no date) *Analisis Penerapan Lima Faktor Model Fama & French di Indonesia*.
- ICAEW BETTER GOVERNMENT SERIES *The role of financial leadership in sustainable public finances A SPECIAL REPORT 2* (2018).
- Isa, M. (2016) 'Institutional Strengthening Model on Culinary Creative Industry As a Regional Economic Development Effort', *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, pp. 352–361. Available at:

[http://eprints.umsida.ac.id/133/1/Muzakar%2520Isa\\_352-361%2520fix.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/133/1/Muzakar%2520Isa_352-361%2520fix.pdf).

- Ita, S.E. (2021) 'Manajemen Resiko Usaha Pada UMKM Pempek Di Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid 19', *Media Ekonomi dan Kewirausahaan* [Preprint]. Available at: <https://jurnal.uss.ac.id/index.php/meku/article/view/144>.
- 'James Tobin' (no date).
- 'John Muth BUKU-TEORI-EKONOMI\_PDF' (no date).
- Lestari Kurniawati (2017) 'OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA', *Manajemen Keuangan Publik*, 1(2).
- 'Modigliani dan Miller teori struktur' (no date).
- Musmini (2013) 'Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil', *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* [Preprint].
- Paputungan, A., Ilat, V. and Morasa, J. (2017) 'Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow)', *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING 'GOODWILL'* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15428>.
- Pranadji, T. (Pusat A.S.E.K.P. (2006) 'Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan', *Jurnal Argo Ekonomi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.178-206>.
- Purwoatmodjo, D. (2007) 'Pembangunan Ekonomi Nasional', *Pembangunan Ekonomi Nasional dan 141Masalah Korupsi. Jurnal Hukum*, p. 7. Available at: <http://commonrepo.um.edu.my/12168/>.
- Putting finance at the heart of decision-making Government Finance Profession A Government Finance Profession paper supported by the National Audit Office* (2013).
- Ramalis Sobandi, D. dan B.T. (2018) 'Transformasi dan Branding Creative Creative Transformation and Branding for Urban Sustainability an Analysis of Pulogadung C@P', *Permukiman*, 13(2).
- Sarungu, J.J. *et al.* (2019) 'The Effect of Government Consumption and Government Investment as Intervening Variables to Growth in

- Indonesia', 20(2), pp. 193–207. Available at:  
<https://doi.org/10.23917/jep.v20i2.6822>.
- Söderlund, A. and Eriksson, J. (no date) *Financial Literacy & Rational Financial Decision Making A study of university students in Sweden*.
- Sudono, A. (2023) 'STUDY OF FINANCIAL LITERACY MEASUREMENT INDICATORS FOR INDEPENDENT COFFEE SHOP MSMES; A LITERATURE REVIEW', *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 14(01), pp. 82–87. Available at:  
<https://doi.org/10.21009/jrmsi.014.1.09>.
- Suhery, Putra, T. and Jasmalinda (2020) 'Jurnal Inovasi Penelitian', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), pp. 1–4.
- Supangat, A. (2015) 'Pendidikan dan Perubahan Iklim', pp. 63–93. Available at:  
<http://dnpi.go.id/portal/id/component/content/article/179-bahasa/lambung-pengetahuan/publikasi/paper/240-pendidikan-dan-perubahan-iklim>.



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 8: KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dr. Sunita Dasman, A.T., M.M.

Universitas Pelita Bangsa

---

# BAB 8

## **KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia telah menampilkan catatan makroekonomi stabilitas, pertumbuhan dan kemiskinan pengurangan selama 20 tahun terakhir. Perekonomian Indonesia tumbuh dengan rata-rata 5,3 persen setiap tahunnya antara tahun 2000 dan 2018, lebih cepat dari rata-rata negara-negara berpendapatan rendah-menengah. Perekonomian menciptakan lebih dari 30 juta lapangan pekerjaan pada sektor jasa dan sektor industri dan telah menggantikan pekerjaan pada sektor pertanian yang produktivitasnya lebih rendah serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga selama periode tersebut. Akibatnya, Indonesia mencapai kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan: angka kemiskinan turun dari 19,1% dari jumlah penduduk pada tahun 2000 menjadi 9,4% dari total penduduk populasi pada bulan Maret 2019. Pendapatan Nasional Bruto/Gross National Income (GNI) per kapita naik lebih dari enam kali lipat dari US\$580 menjadi US\$3.840 selama ini periode yang sama yang mengantarkan jutaan masyarakat Indonesia masuk kelas menengah.

Manajemen fiskal *prudent* berperan penting dalam mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah mematuhi batasan hukum defisit fiskal pada 3% dari *gross domestic product* (GDP) dan rasio utang pada 60% dari utang sejak berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003. Antara tahun 2000 sampai 2018 defisit fiskal 1,5% dari GDP. Rasio utang publik terhadap GDP menurun tajam dari 83% dari GDP pada tahun 2000 menjadi 30% dari GDP pada tahun 2018. Empat lembaga pemeringkat kredit utama mempertimbangkan kredit negara Indonesia peringkat investasi, menguatkan peringkat negara perbaikan lingkungan ekonomi, manajemen fiskal, dan kelayakan kredit secara keseluruhan.

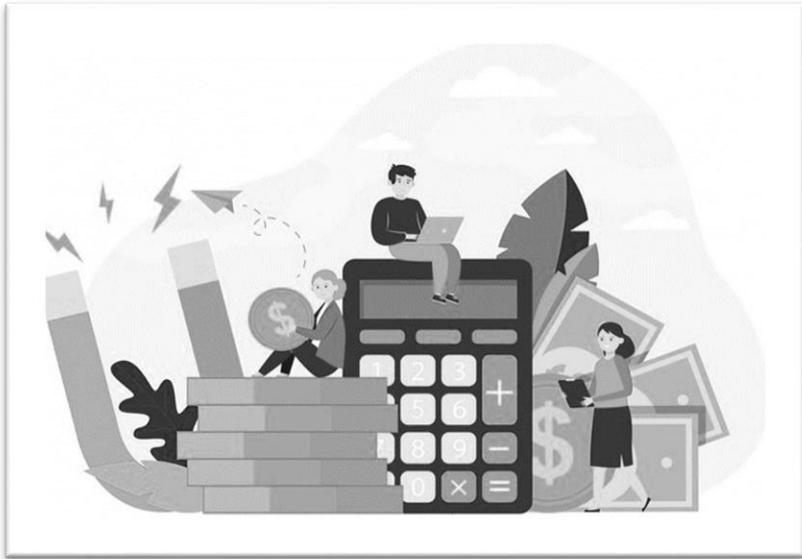
## DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M. 2011. "Subnational Taxation in Developing Countries: A Review of the Literature." *Journal of International Commerce, Economics and Policy* 2 (01):139-161.
- Boex, Jameson, and Jorge Martinez-Vazquez. 2007. "Designing intergovernmental equalization transfers with imperfect data: Concepts, practices, and lessons." In *Fiscal Equalization*, 291-343. Springer.
- Booth, Anne. 2011. "Splitting, splitting and splitting again: A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence." *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 167 (1):31-59.
- Brodjonegoro, Bambang. Martinez-Vazquez. 2002. 'An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prosepcts'. Working Paper 02-13, International Studies Program, Andrew Young School of ....
- Gadenne, Lucie. 2016. *Tax me, but spend wisely? Sources of public finance and government accountability.*
- Gonschorek, G. J., Schulze, G. G., & Sjahrir, B. S. 2018. "To the ones in need or the ones you need? The political economy of central discretionary grants– empirical evidence from Indonesia." *European Journal of Political Economy* 54 (240-260).
- Indonesia Public Expenditure Review, 2020, *Spending for Better Result: Supported by funding from the Governments of Canada and Switzerland and the European Union under the Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM MDTF) and by the Government of Australia (Department for Foreign Affairs and Trade) under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program. Supported by fundi*
- Lewis, Blane D, and Paul Smoke. 2017. "Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: the case of Indonesia." *Fiscal Studies* 38 (1):111-139.

- López-Laborda, Julio, Jorge Martínez-Vázquez, and Carlos Monasterio. 2006. "The practice of fiscal federalism in Spain." International Studies Program Working Paper:06-23.
- Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao. 2012. Localizing development: does participation work? World Bank Publications.
- World Bank. 1996. Evaluating Public Spending: A Framework for Public Expenditure Reviews. Washington, DC: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/509221468740209997/pdf/multi-page.pdf>
- World Bank. 1998. Public Expenditure Management Handbook. Washington, DC: World Bank. <http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/handbook/pem98.pdf>
- World Bank. 2015a. Indonesia's Rising Divide. Jakarta: World Bank. <http://pubdocs.worldbank.org/en/16261460705088179/Indonesias-Rising-Divide-English.pdf>
- World Bank. 2015b. Indonesia Systematic Country Diagnostic: Connecting to the Bottom 40 Percent to the Prosperity. Jakarta: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/576841467987848690/pdf/94066-SCD-P152827-SecM2015-0308-IDA-SecM2015-0212-IFC-SecM2015-0153-MIGASecM2015-0102-Box393228B-OUO-9.pdf>
- World Bank. 2017a. Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that Delivers. December. Jakarta: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/377621523883164713/pdf/Indonesia-economic-quarterly-decentralization-that-delivers.pdf>
- World Bank. 2017b. Indonesia Public Expenditure and Financial Accountability Assessment Report 2017. Jakarta: World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/681171529941208881/pdf/PEFA-Report.pdf>

World Bank. 2019a (forthcoming). Indonesia Sector Infrastructure Assessment Program. Jakarta: World Bank. World Bank. 2019b. Time to Act: Realizing Indonesia's Urban Potential. Jakarta:

World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31304?deliveryName=DM45538>



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 9: KEUANGAN PUBLIK DAN ISU-ISU GLOBAL

Dr. Cut Risya Varlitya. S.E., M.Si.

Universitas Syiah Kuala

# BAB 9

## **KEUANGAN PUBLIK DAN ISU-ISU GLOBAL**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Kuangan publik memberikan gambaran tentang keterkaitan tugas pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya. Keuangan publik mengkaji usaha-usaha pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara maksimal serta digunakan sebagai upaya membiayai berbagai kegiatan publik. Setiap negara mempunyai kriteria tertentu dalam keuangan publiknya. Kebijakan publik yang ditempuh berbagai negara mempunyai perbedaan diantara negara maju, berkembang dan terbelakang. Peranan utama keuangan publik terdiri dari perolehan sumber daya yang diperlukan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik, memperbaiki dampak eksternalitas untuk menaikkan efisiensi ekonomi, menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mendistribusikan kembali pendapatan supaya semua masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan serta mengontrol stabilitas ekonomi (Lin, 2022).

Berbagai peristiwa mewarnai paradigma keuangan publik dunia beberapa tahun terakhir. Munculnya wabah Covid-19 hingga terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi kebijakan keuangan publik dan perekonomian secara global. Sektor publik juga menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Prediksi realisasi pendapatan dan pembiayaan negara dimasa depan menjadi tema yang penting bagi pengambilan kebijakan yang efektif. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di dalam instansi pemerintahan mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan pelayanan kepada warga negara. Dimana AI ini dapat membantu menganalisis *roadmap* pelayanan publik dimasa depan, meningkatkan efisiensi dan kinerja institusi pemerintahan, mempermudah analisis dan pengolahan data, serta mempercepat proses pengambilan suatu

## DAFTAR PUSTAKA

- Boobier, T. (2022). *AI And The Future Of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Ltd.
- European Commission. (2023). *EU action to address the energy crisis*. Retrieved from [https://commission-europa-eu.translate.goog/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/eu-action-address-energy-crisis\\_en?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://commission-europa-eu.translate.goog/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/eu-action-address-energy-crisis_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Habibi, Z., Habibi, H., & Mohammadi, M. A. (2022). The Potential Impact of COVID-19 on the Chinese GDP, Trade, and Economy. *Economies*, 10(73), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10040073>
- Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H., & Tanaga, S. (2011). *Proyek Riset G-20: Peran Indonesia dalam G-20: Latarbelakang, Peran dan tujuan Keanggotaan Indonesia* (Vol. 1). Friedrich Ebert Stiftung.
- Kominfo. (2022). G20pedia. In *Kominfo dan Indonesia Baik*.
- Lin, S. (2022). *China's Public Finance: Reforms, Challenges, and Options* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Liu, Z., & Hu, B. (2020). China's Economy under COVID-19: Short-Term Shocks and Long-Term Changes. *Modern Economy*, 11, 908–919. <https://doi.org/10.4236/me.2020.114068>
- Lu, L., Peng, J., Wu, J., & Lu, Y. (2021). Perceived impact of the Covid-19 crisis on SMEs in different industry sectors: Evidence from Sichuan, China. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55(24), 102085. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102085>
- Lubis, M. S. Y. (2021). Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu. *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU*, 1–7. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>

National Bureau of Statistics of China. (2021). *Households' Income and Consumption Expenditure in 2020*. Retrieved from [http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202101/t20210119\\_1812523.html](http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202101/t20210119_1812523.html)

The World Bank. (2022). *GDP (constant 2015 US\$)*. Retrieved from Data: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=chart>



# KEUANGAN PUBLIK

## BAB 10: MASA DEPAN KEUANGAN PUBLIK

Nuryanti Permata Sari, S.E., Ak., M.M.

Universitas PGRI Palembang

---

# BAB 10

## MASA DEPAN KEUANGAN PUBLIK

---

### A. PENDAHULUAN

Menuju Masa Depan Keuangan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan Dalam era ketidakpastian ekonomi dan perubahan global yang begitu cepat, keuangan publik menjadi landasan utama bagi pembangunan berkelanjutan suatu negara. Bab ini mengeksplorasi tantangan, peluang, dan inovasi yang melandasi masa depan keuangan publik, membawa pembaca melintasi koridor-koridor perkembangan terkini yang memahami esensi transformasi keuangan publik.

Dengan kondisi ini, bagaimana kebijakan keuangan dapat dikembangkan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan menjadi pertanyaan krusial yang akan diulas dalam bab ini. Mempertimbangkan prinsip-prinsip keuangan hijau, bab ini membahas peran keuangan publik dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Manajemen Risiko dan Kebijakan Fiskal yang Responsif Bab ini juga memeriksa cara-cara untuk mengelola risiko dalam menghadapi krisis keuangan, sambil mengeksplorasi reformasi kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat bekerja bersama untuk mencapai stabilitas ekonomi menjadi landasan diskusi yang mendalam.

Pendidikan Keuangan Publik: Kunci Literasi Masyarakat Pentingnya literasi keuangan publik dalam menghasilkan masyarakat yang lebih sadar dan partisipatif terhadap kebijakan keuangan merupakan elemen penting yang akan ditekankan dalam bab ini. Kemudian bagaimana negara-negara dapat saling berbagi pengalaman terbaik, mendukung satu sama lain dalam mengatasi tantangan keuangan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan global merupakan aspek penting yang akan ditelusuri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni, R. C. M. (2020). Transparansi Kebijakan Publik sebagai Strategi Nasional dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(5), 439-454.
- Al-Fadhat, F., & Savitri, J. (2023). Lembaga Keuangan Internasional dan Persoalan Sustainable Development Goals.
- Arifin, B. (2005). *Pembangunan pertanian: paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*. Grasindo.
- Bairizki, A. (2021). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi).
- Darono, A. (2014, June). Penerapan “e-Audit” dalam Pemeriksaan Keuangan Negara: Tinjauan Dualitas Teknologi. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Farid, M. (2019). Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 35-50.
- Firdaus, N. (2021). Metode Layanan Ekosistem TESSA.
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 378-385.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 37-78.
- Indonesia, B., Indonesia, D. G. B., Nasution, A., Goeltom, M. S., Azis, I. J., Hasan, I., ... & Parewangi, A. M. A. SUSUNAN PENGURUS BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN.
- Lantai, S. G. I. B. T., Ikawati, Y., Bahan, K., Sociawanto, T., & Cipta dilindungi oleh undang-undang, H. KEMITRAAN DALAM PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL.
- Lestari, S. (2015). Literasi keuangan serta penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2).

- Madura, I. A. I. N. (2022). VAKSINASI MASSAL MASYARAKAT DESA KARANGEMPAKA BLUTO SUMENEP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19. *EKSISTENSI PELAKSANAAN SUPPORT SISTEM*, 57.
- Nugroho, K. S., & Fuad, A. (2012). Bantenesia.
- Parmitasari, R. D. A. (2023). MANAJEMEN KEUANGAN: PENGANTAR.
- Pradana, R. A., Pitaloka, D., Rukmana, I. L., & Gunawan, A. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Digital: Keterampilan dan Peran di Era Digital. *COMSERVA*, 2(09), 1806-1817.
- Khoifah, A., & Zuhri, S. (2022). Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Creening Tool Terhadap Rancangan Undang-Undang. *Jurnal, Legislasi Indonesia*, 19.
- Kristiawan, M., Suryanti, I., Muntazir, M., Ribuwati, A., & AJ, A. (2018). Inovasi pendidikan. *Jawa Timur: Wade Group National Publishing*, 1-7.
- Kusuma, D. B. W., & Putranto, A. D. (2010). Penerapan Kriteria Optimum Currency Area dan Volatilitasnya: Studi Kasus ASEAN-5+ 3. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 13(2), 193-222.
- Rokan, M. K., & SHI, M. (2013). *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. dalam Berbisnis*. Bentang Pustaka.
- Sani, A., Wiliani, N., Budiyantra, A., & Nawaningtyas, N. (2020). Pengembangan Model Adopsi Teknologi Informasi terhadap Model Penerimaan Teknologi diantara UMKM. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, 5(2), 151-158.
- Sari, P. K., & Fakhrudin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 377-388.
- Sasmitasiwi, B., & Cahyadin, M. (2006). ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN SPREAD SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI INDONESIA PERIODE 1993: I-2005: II Pendekatan Jalur Kredit dan SVAR. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 21(4), 376-398.

- Setiabudi, D. (2015). Pelaksanaan Good Public Governance Pada Lembaga Negara Dalam Kajian Politik. *Ilmu dan Budaya*, 39(46), 5377-5426.
- Setyawasih, R., Baali, Y., Ekopriyono, A., Pasaribu, J. S., Mas'ud, A. A., Simarmata, N., ... & Mose, Y. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA GLOBAL*. Get Press Indonesia.
- Sinambela, E. A., SE, M., Lelo Sintani, M. M., Winanto Nawarcono, S. E., Kamaruddin, M. M. J., SM, M., ... & Saksono, H. *BISNIS DIGITAL*.
- Suzan, L. (2020). PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HEURISTIK (Studi Kasus pada Pedagang Tradisional yang Dikelola oleh PD Pasar Bermartabat): PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HEURISTIK (Studi Kasus pada Pedagang Tradisional yang Dikelola oleh PD Pasar Bermartabat). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 6(1), 1553-1558.
- Tanwir, T., Muhammad, W., Iwan, S., Hotnida, N., & Indra, K. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0).
- Utomo, L. L. (2000). Instrumen Derivatif: Pengenalan Dalam Strategi Manajemen Risiko Perusahaan. *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 2(1), 53-68.
- Yanti, L., Hayati, R., & Noor, Y. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan Publik Dilihat Dari Aspek Transparansi di Kantor Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(1), 168-180.
- Yuningsih, A. (2007). Peran dan Komitmen Indonesia dalam "Millenium Development Goals": (Perspektif Humas Internasional). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 257-270.
- Zulkenedi, Z., Frinaldi, A., & Asnil, A. (2023). Kebijakan Keuangan dan Fisikal untuk Pembangunan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2119-2126.

## **PROFIL PENULIS**

### **Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., CA.**



Penulis adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), BPPK, Kementerian Keuangan. Alumni D3 STAN, S1 PE FEUI, S2 Hiroshima University dan S3 Ruhr-University Bochum, Jerman. Pengalaman bekerja di Kementerian Keuangan sebagai staf dan pejabat struktural di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan PKN STAN.

Sebagai dosen di PKN STAN, mengajar matakuliah Keuangan Publik, Perekonomian Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Manajemen, Manajemen Keuangan, serta Etika dan Antikorupsi. Minat penelitian meliputi ekonomi/keuangan publik, ekonomi pembangunan, serta *governance*. Selain itu, minat pengabdian masyarakat antara lain tentang pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Email penulis: akhsol@pknstan.ac.id.

### **Tine Badriatin, S.Sos., M.Si., M.M.**



Penulis kelahiran Kota Tasikmalaya dimana saat ini merupakan Kepala Kantor Perwakilan Tasikmalaya PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk dan juga merupakan Dosen Praktisi Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Lab Praktika Pasar Modal. Pemegang License Sertifikasi WPPE Pasar Modal, License BNSP Digital Marketing, Pemegang Sertifikasi profesi *Associate Wealth Planner* (AWP) dari FPSB

### **Wilman San Marino, S.E., M.M., CFP.**



Penulis berdomisili di Tasikmalaya. Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Magister Manajemen Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Kandidat Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi

Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi dengan bidang keahlian yakni pasar modal, manajemen keuangan dan ekonomi makro. Dapat dihubungi melalui wilman@unsil.ac.id.

**Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.**



Penulis merupakan staf pengajar Fakultas Ekonomi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Barat yaitu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY). Pendidikan S1 diselesaikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok tahun 2005. Pendidikan S2 di bidang Akuntansi diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Andalas (Unand), Padang tahun 2010. Kemudian Pendidikan S3 dari Fakultas Ekonomi Program Doktorat Universitas Andalas tahun 2021 melalui beasiswa BPPDN. Sebagai seorang akademisi, selain aktif mengajar, penulis juga aktif menulis diberbagai jurnal ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Menulis buku merupakan motivasi penulis kedepannya sebagai akademisi dalam pengembangan ilmu dan pendidikan.

**Hans Victor Sitepu, S.E., M.M., CMA., CACP., CRMP.**



Penulis lahir di Jakarta tanggal 14 November 1981, menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada Agustus 2005, dan Strata Dua (S-2) di Magister Manajemen – Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat pada September 2018. Memperoleh gelar *Certified Management Accountant (CMA)*, *Certification in Audit Committee Practices (CACP)* dan *Certified Risk Management Professional (CRMP)* di tahun 2023. Berkarir di bidang Akuntansi, Risiko dan Auditing selama lebih dari 18 tahun sejak tahun 2005, penulis telah bekerja di berbagai jenis Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industry, mulai dari perkebunan, pertambangan, perdagangan kimia dan energi, serta distributor alat berat, hingga kemudian ditunjuk sebagai Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak

tahun 2022 hingga saat ini. Penulis juga aktif berkarya sebagai Konsultan ISO serta Manajemen Biaya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tahun 2022 hingga saat ini penulis diminta untuk menjadi Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian di Bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis memiliki beberapa artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi.

**Dr. Abdullah, S.E., M.Si.**



Penulis lahir di Rupe-Bima, 18 Maret 1977; Anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak H. Abidin dan Ibu Juhriah (Almh, 2020). Pendidikan: SDN 2 Rupe Tahun 1990; SMPN 2 Wawo-Bima Tahun 1993; SMK Negeri 1 Kota Bima Tahun 1997; Sarjana (S1) Manajemen di STIE Nobel Indonesia Makassar Tahun 2002-2005; Magister (S2) Manajemen dan Keuangan di Universitas Hasanuddin Tahun 2009-2011; dan Doktor Ilmu Manajemen (S3) pada Universitas Muslim Indonesia Tahun 2019-2022. Pekerjaan: Dosen Tetap Program Studi Magister Keuangan Publik (S2) Fakultas Pascasarjana, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar Tahun 2006-sekarang; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) STIE Nobel Indonesia Makassar Tahun 2007-2009, 2015-2019; Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar Tahun 2022-sekarang; Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia-Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Tahun 2016-sekarang; beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain: Buku: Pasar Modal Syariah di Indonesia “Tinjauan Teori dan Aspek Hukum”; Panduan Praktis “Sukses Menjadi Investor Saham Pemula”; Jurnal Ilmiah: Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham sektor Jakarta Islamic Index; Pengaruh Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; dll.

## **Diana Widhi Rachmawati, S.IP., M.M.**



Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya (UNSRI). Palembang tahun 1998 dan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen pada Konsentrasi Manajemen Keuangan di STIE IPWI Jakarta tahun 2001. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada Program Studi Doktor Pendidikan FKIP di Universitas Bengkulu. Semenjak tahun 2012 menjadi dosen tetap di Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dan mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Analisa Laporan Keuangan, Manajemen dan Kepemimpinan, Kewirausahaan, Akuntansi Perbankan dan Akuntansi Perbankan Syariah, dan bertugas juga sebagai Kepala Laboratorium Komputer Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang. Selain itu juga pernah terlibat langsung dalam team manajemen sebagai Section Head di PT Lottemart Wholesale Indonesia store 14 Palembang sejak tahun 2004 hingga 2018, sudah menghasilkan beberapa buku di antaranya Sistem Informasi Akuntansi, Manajemen Keuangan Perusahaan, Analisis Laporan Keuangan, Auditing Petunjuk Praktisi Akuntan Publik, Pengantar Sosiologi, Kewirausahaan, Teori Dan Konsep Pedagogik, Pengantar Manajemen, Pengantar Ilmu Politik, Perilaku Organisasi, Bunga Rampai Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan, Metodologi Penelitian, Kewirausahaan, Statistik Multivariat, Kewirausahaan (Konsep dan Praktik), Pembelajaran Muatan Lokal Jilid 1, Bank dan Lembaga Keuangan 1, Pengantar Bisnis, Bahasa Korea, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, Bertempat tinggal di Jalan Pelita no 1451 rt 22 rw 06 Kecamatan Kemuning Kelurahan 20 Ilir DII Sekip Bendung Palembang dianawidhi72@gmail.com.

### **Robert Tua Siregar, Ph.D.**



Penulis lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 November 1967. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Teknik Manajemen Industri pada 06 Januari 1992, dan Sarjana Sospol pada 04 November 1992. Ia merupakan alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja XII Medan dan Sosiologi Fakultas Sospol Univ. Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 1998 mengikuti pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus pada tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 2007 menjalani Doktor Falsafah Bidang Urban & Regional Planning pada University Of Malaya. Sejak tahun 1994 menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta di Pematangsiantar, Dosen DpK di Program Doktor (S3) Manajemen di Universitas Prima Indonesia. roberttuasiregar@unprimdn.ac.id.

### **Dr. Sunita Dasman, A.T., M.M.**



Penulis lahir di Cirebon tanggal 3 Agustus 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kimia Tekstil di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan di Universitas Mercu Buana serta menyelesaikan Program Doktor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan konsentrasi manajemen keuangan di Universitas Padjadjaran. Penulis menekuni bidang Menulis di beberapa artikel ilmiah.

### **Dr. Cut Risya Varlitya, S.E., M.Si.**



Penulis lahir di Banda Aceh yang merupakan lulusan dari Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2023. Penulis mendapatkan pengalaman kerja dimulai tahun 2007 sebagai *Enumerator* pada *Regional Economic Development Institute (REDI)* Surabaya dan *World Bank* Indonesia. Pada tahun 2009, penulis ikut berperan serta dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui peningkatan mutu proses belajar dan mengajar ketika di *Decentralized Basic Education 2-USAID*. Pada tahun 2015 penulis diangkat sebagai Dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala dan aktif dalam melakukan analisis dan penelitian di bidang ekonomi terutama Ekonomi Regional dan Perkotaan, Makroekonomi, Mikroekonomi dan Keuangan Publik. Penulis juga berpengalaman menjadi Reviewer pada *Journal of Accounting Research, Organization and Economics (JAROE)* yang terindeks Sinta 2 dan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Sejak tahun 2022 penulis menjadi Editor Buku Profesional karena memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

### **Nuryanti Permata Sari, S.E., Ak., M.M.**



Penulis lahir di Palembang 16 Oktober 1980, lulus D.III Fakultas Ekonomi Akuntansi Di Universitas Sriwijaya 2002, Lulus S1 Program Extension Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sriwijaya 2006, dan lulus S2 Magister Manajemen Keuangan di Universitas Tridinanti Palembang 2010. Saat ini adalah Dosen Tetap Yayasan Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP dari tahun 2009-sekarang. Mengampu mata kuliah Akuntansi, Pemeriksaan Akuntansi, Akuntansi Biaya, Akuntansi Perbankan, Aspek hukum dan Ekonomi, Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan II, Pengantar Manajemen, Kewirausahaan, Akuntansi Publik, Akuntansi Pemerintahan, Manajemen Kepemimpinan, Lembaga Keuangan dan Bank. Pernah Bekerja di Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru 2009-2011 dan di Perusahaan Daerah Prodexim 2014-2020 Bagian Keuangan. Bertempat tinggal di Jalan Mayor Salim

Batubara Komplek PU No 595 Sekip Tengah Palembang. Email penulis atiekalex83@gmail.com.

# KEUANGAN PUBLIK

Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen atau warga masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung akan mempengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi masyarakat.

Keuangan publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah dalam perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat kegagalan pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat digunakan oleh pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk menyediakan barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta, kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih menghilangkan kegagalan pasar (*market failures*), intervensi pemerintah dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (*government failures*).